



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINA HARJANTI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM
3. NHK : 523345

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.752.494.459

1. Tanah Seluas 539 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 345.723.000
2. Tanah Seluas 691 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 256.038.282
3. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/220 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.894.683.290
4. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m2/144 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.860.059.430
5. Tanah Seluas 3.146 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 514.122.825
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1.070 m2/49 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 452.710.542
7. Tanah dan Bangunan Seluas 748 m2/160 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 314.017.383
8. Tanah Seluas 978 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 115.139.707

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 307.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
2. MOBIL, HONDA SUV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.



150.000.000

3. MOTOR, KTM SPORT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 104.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 256.300.993

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 49.687.950

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 6.469.483.402

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.469.483.402

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.